

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Dana BOP

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Pengertian pengelolaan dikemukakan oleh Schermerhorn, *“management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the use of resources to accomplish performance goals.”* pengelolaan merupakan proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan segenap sumber daya untuk digunakan agar tujuan kinerja dapat tercapai.¹

Menurut Kreitner, *“management is the process of working with and through others to achieve organizational objectives in a changing environment.”* Pengelolaan merupakan proses bekerja dengan orang lain dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi meskipun dalam keadaan lingkungan yang dapat berubah.²

Sedangkan menurut *American Society of Mechanical Engineers*, yang dikutip Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *“Management is the art and*

¹ John R Schermerhorn, *Introduction to Management*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2010) h. 17.

² Robert Kreitner, *Management*, (Canada: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009) h. 5.

*science of organizing and directing human effort applied to control the forces utilize the materials of nature for the benefit of man.”*³

Pengelolaan merupakan ilmu dan seni mengorganisasi dan memimpin usaha manusia, diterapkan untuk pengawasan dan pengendalian tenaga serta memanfaatkan bahan alam bagi kebutuhan manusia.

Pendapat lainnya mengenai pengertian dari pengelolaan menurut Nickels, yang dikutip oleh Tisnawati, “*management is a process used to accomplish organizational goals through planning, organizing, directing, and controlling people and other organizational resources.*”⁴ Artinya pengelolaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Husman, manajemen dalam arti luas meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan sumber daya organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁵ Manajemen berperan penting dalam organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya serta membantu dalam

³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2009),h. 87.

⁴ Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) h.6.

⁵ Husaini Husman, *Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) h. 6.

melaksanakan fungsi kepemimpinan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Griffin menjelaskan mengenai pengertian manajemen bahwa:

Manajemen adalah serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.⁶

Manajemen atau pengelolaan merupakan kegiatan yang didalamnya termasuk perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, yang ditujukan untuk pengarahan sumber daya organisasi guna pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Springer berpendapat bahwa, "*management refers to the process of getting activities completed efficiently and effectively.*" Manajemen mengacu pada proses untuk mendapatkan kegiatan secara efisien dan efektif, yaitu mendapatkan output yang lebih besar dari input yang diberikan dan dapat mencapai tujuan organisasi. Proses yang dimaksud dalam manajemen adalah kegiatan yang berkaitan dengan fungsi manajemen.⁷

⁶ Ricky Griffin, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2004) h. 27/

⁷ Mitchell L. Springer, *A Concise Guide to Program Management*, (United States of America: Purdue University Press, 2004) h. 53.

Dari beberapa pendapat tentang definisi manajemen yang telah dikemukakan para ahli di atas, ditemukan persamaan definisi yang dikemukakan oleh Nickels, Husman, dan Griffin, yaitu manajemen merupakan serangkaian aktivitas dalam organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengawasan/pengendalian untuk mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan Schermerhorn menambahkan fungsi memimpin (*leading*) dalam kegiatan pengelolaan. Selain persamaan, ditemukan juga perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh *American Society of Mechanical Engineers*, Kreitner, dan Springer.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan/pengendalian terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Salah satu sumber daya yang diarahkan dalam aktivitas manajemen adalah finansial atau sumber dana organisasi. Untuk itu diperlukan pengelolaan atau manajemen keuangan guna

terkasannya program dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut *BPP Learning Media*, “*Financial management can be defined as the management of the finances of an organisation in order to achieve the financial objectives of the organization*”. Manajemen keuangan merupakan pengelolaan keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan dalam organisasi.⁸

Menurut Depdiknas Ditjen Diknasmen, yang dikutip oleh Jamal, Manajemen kuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.⁹ Di dalam mengelola keuangan, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan, sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penggunaan keuangan.

Menurut Husnan, yang dikutip oleh Yusanto, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, dimana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pendayagunaan dana.¹⁰ Manajemen keuangan merupakan kegiatan

⁸ BPP Learning Media, *Financial Management: Study Text*, (United Kingdom: BPP Learning Media, 2009) h. 5.

⁹ Jamal, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012) h. 217.

¹⁰ Yusanto, *Mengagagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h, 175.

yang berfungsi untuk menghimpun serta mendayagunakan dana yang ada dalam organisasi.

Selanjutnya pendapat yang sejalan dengan pendapat diatas menurut Solomon, yang dikutip oleh Periasamy "*financial management is concerned with the management decisions that result in the acquisition and financing of long term and short term credits of a firm.*"¹¹ Artinya manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan manajemen yang menghasilkan perolehan dan pembiayaan jangka panjang dari kredit jangka pendek dari suatu perusahaan.

Dalam manajemen keuangan adanya kegiatan yang berkaitan dengan keputusan manajemen untuk menghasilkan pemasukan dan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi.

Pendapat lainnya dalam hal manajemen keuangan menurut Abu Bakar, manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan secara menyeluruh.¹² Manajemen keuangan merupakan kegiatan memperoleh keuangan dan mengelola keuangan organisasi untuk mencapai tujuan.

¹¹ Periasamy, *Financial Management*, (New Delhi: McGraw-Hill, 2009) h. 3.

¹² Abu Bakar, *Akuntansi*, (Jakarta: Grasindo, 2004) h. 75.

Menurut Sutarno, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya se-efektif, se-efisien, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba.¹³ Dalam manajemen keuangan terdapat aktivitas organisasi untuk memperoleh dana sebanyak-banyaknya yang digunakan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan keuntungan.

Dalam prosesnya, pengelolaan keuangan diawali dengan perencanaan yang dikenal dengan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan serta pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Nurhatatti, Pengelolaan dana diperlukan dengan benar, agar dapat dipastikan: a) dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan memperoleh hasil yang maksimal, b) lembaga atau organisasi dapat terus berjalan, c) mencegah terjadinya kekeliruan dan penyalahgunaan dana, sehingga apabila hal tersebut terjadi dapat dikendalikan dalam waktu singkat.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi manajemen keuangan yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan aktivitas

¹³ Sutarno, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 173.

¹⁴ Nurhatatti, *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014) h. 46.

penatausahaan keuangan yang berkaitan dengan keputusan manajemen untuk memperoleh dana dan mendayagunakan dana untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.

Manajemen keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat menentukan dalam kajian manajemen pendidikan.¹⁵ Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut sekolah untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan pertanggungjawaban keuangan sekolah secara efektif, efisien, dan transparan. Di dalam manajemen keuangan sekolah di DKI Jakarta, salah satu sumber pendanaan pendidikan ialah dana biaya operasional pendidikan.

2. Fungsi Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok yang membentuk suatu proses dalam manajemen. Beberapa fungsi terkait dalam pengelolaan di suatu organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran kinerja dalam organisasi serta menjadi acuan dalam proses manajemen. Menurut Herujito fungsi pengelolaan adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam

¹⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) h. 194.

suatu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁶ Fungsi pengelolaan merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam proses manajemen sehingga membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Terdapat berbagai fungsi pengelolaan dalam organisasi yang dijelaskan oleh para ahli dengan pendapat yang berbeda-beda, seperti pendapat Fayol yang dikutip oleh Herujito bahwa tugas utama seorang manajer adalah merencanakan (*to plan*), mengorganisasikan (*to organize*), mengkoordinasikan (*to coordination*), dan mengawasi (*to control*).¹⁷

Menurut Terry terdapat beberapa fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹⁸

Pendapat ahli lainnya menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan dapat digolongkan menjadi fungsi organik dan fungsi penunjang. Menurut Siagian, fungsi organik merupakan keseluruhan fungsi utama yang mutlak perlu dilakukan oleh manajer dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan fungsi penunjang

¹⁶ Yayat Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bogor: Grasindo, 2001) h. 17

¹⁷ *Ibid.*, h. 20.

¹⁸ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, penerjemah J. Smith D.F.M (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 15.

merupakan kegiatan dalam organisasi yang dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi organik para manajer. Fungsi organik yang dimaksud antara lain, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian.¹⁹

Persamaan definisi mengenai fungsi pengelolaan yang di kemukakan oleh Fayol dan Terry bahwa fungsi pengelolaan mencakup pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Serta adanya perbedaan dalam fungsi manajemen yang di kemukakan oleh Siagian dengan 4 teori diatas memiliki hampir kesamaan tetapi adanya perbedaan yaitu dari penambahan penggerakan dan penilaian jadi fungsi pengelolaan dalam konsep Siagian yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan penilaian.

Berdasarkan pendapat beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

¹⁹ Sondang Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hh. 32-33.

Dalam kegiatan pengelolaan, khususnya pengelolaan keuangan terdapat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan dan pelaksanaan.

a. Perencanaan

Menurut Handoko, yang dikutip oleh Husman, perencanaan meliputi 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi. 2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.²⁰ Dalam kegiatan perencanaan, dilakukan penetapan tujuan organisasi dan ditentukan strategi serta sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Justine berpendapat bahwa perencanaan adalah proses pembuatan tujuan perusahaan dan memilih tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, yakni: 1) menetapkan tujuan organisasi, 2) membuat asumsi, 3) memilih tindakan, 4) memulai kegiatan, 5) melakukan perencanaan ulang.²¹

Dalam perencanaan, tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yakni: pertama, penetapan tujuan organisasi yang dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan. Kedua, membuat perkiraan mengenai lingkungan di mana tujuan akan

²⁰ Husaini, *op.cit.*, h. 77.

²¹ Justine, *Anggaran Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2006) hh. 1-2.

dicapai. Ketiga, memilih tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, memulai kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari rencana menjadi tindakan atau aksi. Kelima, melakukan perencanaan ulang apabila terdapat kekurangan pada perencanaan awal.

Selanjutnya definisi perencanaan keuangan dijelaskan oleh Mulyasa bahwa,

perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.²²

Dalam manajemen keuangan, perencanaan merupakan kegiatan untuk merencanakan sumber dana guna menunjang kegiatan demi tercapainya tujuan. Sumber daya dalam organisasi diarahkan sebagai penjabaran rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Selanjutnya pendapat yang sejalan dengan pendapat diatas menurut Jones, yang dikutip oleh Mulyono, perencanaan finansial yang disebut *budgeting* merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber dana yang tersedia untuk mencapai sasaran yang

²² Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) h. 173.

diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.²³ Perencanaan keuangan merupakan kegiatan mengoordinasikan sumber dana yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Mulyasa menambahkan bahwa dalam merencanakan anggaran kegiatan yang dilakukan yakni mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur dan menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis efektivitas biaya serta membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai tujuan.²⁴

Menurut Justine, rencana keuangan (*financial plan*) adalah penjabaran rencana menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan atau rencana keuangan adalah usaha untuk mengkuantifikasikan tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan.²⁵ Dalam perencanaan keuangan, rencana organisasi dijabarkan menjadi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Selanjutnya Mulyasa menjelaskan bahwa perencanaan keuangan dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh

²³ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: Ar-ruzz Media, 2010) h. 161.

²⁴ Mulyasa, *op.cit.*, h. 175.

²⁵ Justine, *op.cit.*,h. 30.

beberapa sumber yang esensial, seperti: a) sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya, b) tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, c) menggunakan dan menerapkan teknologi yang tepat, d) tersedianya dana yang memadai guna menunjang pelaksanaan.²⁶

Brigham menambahkan bahwa, proses perencanaan keuangan dapat dibagi menjadi enam langkah. Pertama, memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakan proyeksi tersebut untuk menganalisis dampak dari rencana terhadap proyeksi laba. Kedua, menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung rencana lima tahunan. Ketiga, memprediksi ketersediaan dana selama lima tahun ke depan. Keempat, menetapkan sistem pengendalian untuk mengatur alokasi dan penggunaan dana di dalam organisasi. Kelima, mengembangkan prosedur dalam organisasi guna menyesuaikan rencana dasar jika prediksi keuangan yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. Keenam, menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja.²⁷

Menurut Matin, pada perencanaan anggaran pendidikan tingkat provinsi, kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang

²⁶ E. Mulyasa, *op.cit.*, h. 200.

²⁷ Brigham, *Fundamentals of Financial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) hh. 254-256.

akan dicapai beserta biaya yang diperlukan pada tahun mendatang diolah dan di analisis untuk bahan penyusunan laporan tahunan maupun usulan program Dinas Pendidikan. Langkah-langkah kegiatannya adalah:²⁸

- a) Mengolah pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dari seluruh Kandepdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tahun yang akan datang (T0+1)
- b) Mengolah usulan program Kandepdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan masukan penyusunan usulan kantor wilayah Kandepdikbud/Dinas Pendidikan Provinsi ke Pusat (Kemdikbud) dan sebagai bahan Rakerda Tingkat I dan perencanaan sektoral.
- c) Melaksanakan Rakerda Tingkat I, hasil Rakerda dijadikan masukan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi tahun berikutnya.
- d) Memadukan/menyesuaikan kebutuhan sasaran dan anggaran yang akan diusulkan oleh Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.
- e) Menyusun usulan perencanaan rutin Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk UKOR Induk/UKOR terurai termasuk SPP/DPP.
- f) Menyusun usulan perencanaan pembangunan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk usulan proyek lanjutan atau usulan proyek baru.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau rencana organisasi demi tercapainya tujuan.

²⁸ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 88.

b. Pelaksanaan

Menurut Terry, pelaksanaan atau *actuating* disebut juga sebagai ‘gerakan aksi’ yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan agar tujuan-tujuan dalam manajemen dapat tercapai.²⁹ Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dijalankan agar tujuan dalam manajemen dapat tercapai.

Menurut Mulyono, *Implementation in values accounting* (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.³⁰ Pelaksanaan anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan memungkinkan terjadinya penyesuaian jika diperlukan.

Selanjutnya Mulyasa menerangkan mengenai pelaksanaan anggaran bahwa,

mengelola pelaksanaan anggaran yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.³¹

²⁹ George Terry, *op.cit.*, h. 17.

³⁰ Mulyono, *op.cit.*, h. 161.

³¹ Mulyasa, *op.cit.*, h. 175.

Sementara itu Nurhatatti menjelaskan bahwa, pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan orang yang memegang fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan.³² Dalam pelaksanaan keuangan, kegiatan dilakukan oleh pemegang fungsi otorisator yaitu melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran, pemegang fungsi ordonator yaitu melakukan pemeriksaan atas permintaan dan penggunaan dana, serta bendaharawan yaitu orang yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang dan melakukan pertanggungjawaban.

Menurut Mulyasa, pelaksanaan keuangan sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan, yakni penerimaan dan pengeluaran. Pertama, penerimaan keuangan sekolah yang berasal dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Kedua, setiap pengeluaran dana harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah. Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran

³² Nurhatatti, *op.cit.*, h. 47.

keuangan sekolah untuk pembelian beberapa sumber atau input dari kegiatan di sekolah.³³

Mulyasa menambahkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan tingkat sekolah, sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan.³⁴ Dalam pelaksanaan keuangan tingkat sekolah, beberapa anggaran lebih ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang tidak dapat diubah dari petunjuk penggunaan atau pengeluarannya oleh sekolah. Oleh karena itu, sekolah hanya terbatas pada pengelolaan tingkat operasional.

Kemudian dari pendapat berbagai ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan adalah sebagai usaha menggerakkan sumber keuangan dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Dana Biaya Operasional Pendidikan

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekolah/Madrasah berdasarkan jumlah peserta didik dan pendidik non PNS terdaftar.³⁵ Dana BOP dialokasikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada

³³ E. Mulyasa, *op.cit.*, hh. 201-203.

³⁴ Mulyasa, *op.cit.*, h. 176.

³⁵ Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2013, h.4.

sekolah/madrasah negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan guru non PNS yang sudah terdaftar.

Tujuan umum pemberian dana BOP bagi Sekolah/Madrasah Negeri adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Sekolah/Madrasah Negeri dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Tujuan khusus pemberian dana BOP bagi Sekolah/Madrasah adalah untuk:

- a. Membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan Ekstrakurikuler pada Sekolah/Madrasah Negeri;
- b. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah/Madrasah Negeri;
- c. Memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium Non PNS pada Sekolah/Madrasah Negeri;
- d. Melengkapi kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajar pada Sekolah/Madrasah Negeri;
- e. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah/Madrasah Negeri; dan
- f. Meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah/Madrasah Negeri.³⁶

Selanjutnya dalam Peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2013, dijelaskan mengenai kewajiban setiap Sekolah/Madrasah penerima dana BOP, yaitu:

- a. Membukukan penerimaan dan pengeluaran dana BOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mempublikasikan secara transparan di lingkungan Sekolah/Madrasah Negeri yang mudah terlihat dan menginformasikan dana BOP yang diperoleh kepada para

³⁶ *Ibid.*, pasal 2, hh.4-5.

- guru, orang tua/wali Peserta Didik dan Komite Sekolah/Madrasah Negeri;
- c. Membuat, menyampaikan tembusan dan menyimpan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Suku Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan terkait dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Negeri dan Bendahara Sekolah/Madrasah Negeri;
 - d. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melampirkan fotokopi rekening Koran setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.³⁷

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana BOP adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk sekolah/madrasah negeri berdasarkan jumlah peserta didik dan guru non PNS yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan.

Pengelolaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekolah/Madrasah Negeri guna membiayai kegiatan pendidikan di sekolah.

³⁷ *Ibid.*, pasal 18, h. 9.

B. Sistem Elektronik Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (e-RKAS)

1. Pengertian Sistem

Menurut Campbell, yang dikutip oleh Amirin, sistem merupakan himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.³⁸ Sistem adalah suatu kesatuan komponen yang berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya pendapat yang sejalan dengan pendapat diatas menurut Sanusi yang dikutip oleh Badrudin, sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau subsistem-subsistem yang saling berinterkasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.³⁹

Menurut pendapat Amsyah, sistem adalah sekumpulan “benda” nyata atau abstrak (*a set of things*) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, dan saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.⁴⁰

³⁸ Tatang Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h.9.

³⁹ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 231.

⁴⁰ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.4.

Sedangkan menurut Sutabri suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung, dan terpadu.⁴¹ Sistem merupakan sekumpulan unsur, komponen atau variabel yang saling terikat satu sama lain.

Selanjutnya menurut pendapat Ryans yang dikutip oleh Rochaety,

“system is any identifiable assemblage of element (object, person, activities, information records, etc) which are interrelated by process or structure and which are presumed to function as an organizational entity generating an observable (or sometimes merely inferable) product.”⁴²

Sistem merupakan suatu kumpulan yang diidentifikasi dari elemen (objek, orang, kegiatan, catatan informasi) yang saling terkait dengan proses atau struktur yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi untuk menghasilkan suatu produk.

Menurut Shorde yang dikutip oleh Rochaety, ada enam ciri dari sebuah sistem yaitu: a) perilaku berdasarkan tujuan tertentu, b) keseluruhan, c) keterbukaan, d) terjadi transformasi, e) terjadi korelasi, f) memiliki mekanisme kontrol artinya terdapat kekuatan yang mempersatukan dan mempertahankan sistem yang

⁴¹ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2006) h. 2.

⁴² Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 3.

bersangkutan.⁴³ Suatu hal bisa dikatakan sistem apabila memiliki tujuan tertentu, bersifat menyeluruh, terbuka, memungkinkan terjadinya transformasi, terdapat hubungan satu sama lain, serta memiliki kekuatan yang dapat mempertahankan dan mempersatukan sistem itu sendiri.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mukhneri menambahkan bahwa pada dasarnya sistem memiliki beberapa unsur yaitu: a) sistem memiliki komponen dan elemen, b) adanya hubungan antara komponen di dalam sistem, c) adanya kerjasama di antara komponen, d) adanya interaksi diantara komponen dan, e) adanya tujuan yang akan dicapai melalui sistem tersebut.⁴⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Elektronik (e-RKAS)

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/RKAM adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

⁴³ *Ibid.*, h. 3.

⁴⁴ Mukhneri, *Manajemen Sistem*, (Jakarta: BPJM FIP, 2008), h. 15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbangan masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian kegiatan, sebagai pedoman membiayai penyelenggara pendidikan di Sekolah/Madrasah Negeri selama 1 (satu) tahun pelajaran.⁴⁵

Menurut Peraturan Gubernur nomor 140 Tahun 2014, prinsip-prinsip penyusunan RKAS/M, antara lain:

- a) Disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah/madrasah;
- b) Pembahasan dilakukan berdasarkan atas musyawarah dan mufakat antara sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah dan orangtua peserta didik/masyarakat;
- c) Berkeadilan, transparan dan akuntabel; dan
- d) Disusun dan disahkan sebelum tahun pelajaran baru dimulai.⁴⁶

Sistem E-RKAS merupakan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dalam bentuk sistem elektronik. Sistem E-RKAS terdiri dari komponen yang saling berkaitan guna membuat rencana dan anggaran kegiatan sekolah secara elektronik agar lebih efektif dan efisien. Dalam sosialisasi sistem e-RKAS pada bulan November 2015, dijelaskan bahwa e-RKAS memiliki beberapa manfaat, antara lain: memudahkan sekolah, memudahkan dinas pendidikan, sesuai dan kompatibel dengan e-budgeting dan terbuka.⁴⁷

⁴⁵ Peraturan, *op cit.*, h.4.

⁴⁶ Peraturan Gubernur nomor 140 Tahun 2014, pasal 4, h. 6.

⁴⁷ Paparan Sosialisasi Sistem E-RKAS, 2015, h. 2.

Pertama, memudahkan sekolah dalam membuat perencanaan kegiatan, perencanaan pembelajaran barang dan jasa, serta pertanggungjawaban. Dengan adanya sistem e-RKAS maka kegiatan di sekolah dalam mengelola keuangan akan lebih efektif dan transparan.

Kedua, memudahkan dinas pendidikan, suku dinas, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan sekolah. Dengan sistem ini, para pemangku kepentingan pendidikan dapat langsung mengamati penyerapan anggaran di sekolah dan melakukan pengendalian dengan mudah.

Ketiga, sesuai dan kompatibel dengan implementasi e-budgeting di DKI Jakarta karena sistem e-RKAS yang langsung terhubung dengan sistem e-budgeting di DKI Jakarta.

Keempat, terbuka untuk usaha-usaha yang dapat mendorong kinerja sekolah.

Di dalam sosialisasi sistem e-RKAS dijelaskan pula mengenai akses Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, dan sekolah terhadap aplikasi sistem E-RKAS, antara lain:

- a. Bagi Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan; menginput jumlah siswa penerima BOS dan BOP, merekap penerimaan dana

BOP dan BOS di semua Sekolah, melihat RKAS masing-masing sekolah, melihat rencana penyerapan anggaran masing-masing sekolah, melihat realisasi penggunaan anggaran, melihat data master (bidang, standar pendidikan, dan kegiatan)

- b. Bagi Sekolah; membuat RKAS, membuat dan penginput rencana penyerapan anggaran, memasukkan realisasi penggunaan anggaran, melihat laporan RKAS tahunan dan bulanan , melihat/memilih komponen biaya.⁴⁸

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mei Hidayati, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman Tahun 2011.⁴⁹

Fokus dalam penelitian adalah mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Tim

⁴⁸ Paparan, *op.cit.*, hh. 13-14.

⁴⁹ Hidayati, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman Tahun 2011*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) <http://eprints.uny.ac.id/7770/> diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 07:45.

Manajemen BOS Kabupaten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dianalisis dengan tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meliputi: (a) Perencanaan anggaran dana BOS dituangkan dalam bentuk Rencana Penggunaan Dana BOS. (b) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS diawali dengan kegiatan penyaluran dana BOS dengan melaporkan data jumlah murid dalam bentuk LKIS. (c) Evaluasi penggunaan dana BOS dilakukan secara insidental dalam bentuk pengawasan melekat oleh kepala sekolah dan monitoring internal dilakukan oleh tim manajemen BOS Kabupaten. (2) Hambatan yang ditemui oleh tim manajemen BOS sekolah dalam pengelolaan dana BOS yaitu adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana BOS. Hambatan lainnya yaitu, adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. (3) Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu berkonsultasi dengan tim manajemen BOS Kabupaten, musyawarah dengan pihak internal sekolah dan orang tua murid, serta memanfaatkan dana talangan dari sumber dana lain yang belum segera dimanfaatkan.

Penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizky Amalia, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011.*⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP N 3 Pekuncen tahun 2011. Pengelolaannya dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil tempat di SMP N 3 Pekuncen, dengan subyek penelitian Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman, yang berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan dana BOS di SMP N 3 Pekuncen dilakukan pada saat penyusunan RAPBS, disusun oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Komite

⁵⁰ Rizky Amalia, *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Tahun 2011*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) <http://eprints.uny.ac.id/7998/> diakses pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 02:43.

Sekolah, Guru, Karyawan, dan Orang Tua Siswa. Sekolah juga telah menunjuk Bendahara BOS untuk menangani masalah keuangan BOS. (2) Dari segi pelaksanaan, penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional non personalia Sekolah sesuai dengan buku panduan. Pembelian barang dan jasa dilakukan oleh tim belanja barang dengan diketahui oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pembukuan dilakukan setiap hari dan setiap ada pengeluaran. (3) Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan pada saat rapat. Secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas setiap triwulan sekali. (4) Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan setiap triwulan kepada Dinas dengan menyerahkan SPJ BOS yang berisi buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan bukti pengeluaran.